

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Transfer terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Barat periode 2021–2025, maka diperoleh kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Jawa Barat Periode 2021–2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Barat pada periode 2021–2025. Hasil ini menyatakan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil dihimpun melalui pajak daerah, retribusi, dan sumber pendapatan sah lainnya, tingkat kemandirian keuangan daerah akan semakin meningkat. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah di Jawa Barat telah mampu mengoptimalkan potensi ekonominya sebagai sumber pendanaan utama untuk membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri.

2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Jawa Barat Periode 2021–2025

Belanja modal terbukti mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat pada periode 2021–2025. Temuan ini mencerminkan bahwa naiknya alokasi belanja modal dalam jangka pendek justru menurunkan rasio kemandirian fiskal. Hal ini dikarenakan belanja modal memerlukan waktu (*time lag*) untuk menghasilkan dampak terhadap pendapatan daerah, sementara pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur tersebut meningkatkan beban total belanja yang, jika tidak dibarengi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara cepat, akan memperbesar celah fiskal daerah.

3. Pengaruh Dana Transfer terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Jawa Barat Periode 2021–2025

Dana Transfer terbukti mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Barat pada periode 2021–2025. Hasil ini mencerminkan bahwa semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap kucuran dana dari pemerintah, tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut akan semakin menurun. Sehingga peningkatannya secara otomatis memperkecil nilai kemandirian. Hal ini mengonfirmasi adanya fenomena ketergantungan fiskal (*fiscal dependency*), di mana bantuan pusat masih menjadi tulang punggung utama dalam pembiayaan operasional dan pembangunan daerah kabupaten/kota di Jawa Barat dibandingkan dengan optimalisasi sumber daya lokal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Transfer terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Barat periode 2021-2025, maka saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

- a. Pemerintah daerah disarankan untuk terus mengoptimalkan penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah. Mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian, maka peningkatan efektivitas pemungutan pendapatan melalui digitalisasi (seperti e-Samsat dan e-Retribusi) perlu diperkuat untuk mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal.
- b. Pemerintah daerah perlu melangsungkan evaluasi terhadap alokasi Belanja Modal. Mengingat hasil penelitian menunjukkan pengaruh negatif terhadap kemandirian dalam jangka pendek, maka belanja modal sebaiknya diarahkan pada proyek infrastruktur yang bersifat produktif dan memiliki *multiplier effect* ekonomi yang cepat. Hal ini penting agar belanja modal tidak sekadar membebani APBD melalui biaya pemeliharaan, tetapi mampu menstimulus pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa depan.

- c. Mengingat pengaruh negatif dana transfer yang mencerminkan ketergantungan fiskal, pemerintah daerah disarankan untuk tidak menjadikan dana pusat sebagai penopang utama operasional rutin. Pemerintah daerah perlu membangun komitmen untuk menjadikan dana transfer hanya sebagai pelengkap atau stimulus pembangunan, sehingga daerah tidak terjebak dalam zona nyaman yang menghambat inovasi kemandirian keuangan daerah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen lain yang belum masuk dalam model penelitian ini, seperti pertumbuhan ekonomi (PDRB), ukuran pemerintah daerah, atau opini audit BPK sebagai variabel moderasi. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat memperpanjang periode pengamatan guna melihat dampak jangka panjang (time lag) dari belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah secara lebih akurat.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

- a. Pemerintah daerah direkomendasikan untuk menyusun peta jalan (*roadmap*) kemandirian fiskal yang terukur, dengan target pengurangan persentase Dana Transfer secara bertahap dan peningkatan kontribusi PAD secara konsisten setiap tahunnya.
- b. Pemerintah daerah direkomendasikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja modal melalui sistem audit yang ketat, guna memastikan bahwa setiap investasi fisik yang dilakukan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemandirian keuangan daerah dalam jangka panjang.
- c. Perlu adanya penguatan pengawasan terhadap efektivitas penggunaan Dana Transfer (khususnya DAK dan DAU) agar benar-benar dialokasikan untuk sektor-sektor yang dapat membangun kapasitas ekonomi daerah, sehingga daerah tidak terjebak dalam fenomena ketergantungan fiskal (*fiscal dependency*).

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya adalah memperluas cakupan variabel independen dengan memasukkan faktor makro seperti Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) atau Ukuran Pemerintah Daerah, serta mencoba memosisikan Opini Audit BPK sebagai variabel moderasi untuk melihat sejauh mana kualitas tata kelola memengaruhi hubungan antarvariabel, kemudian memperpanjang periode pengamatan guna mendeteksi efek jangka panjang dari belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah secara lebih tepat.

